



ASPIRASI kita

Edisi 10
Oktober 2025



**DARURAT
JUDOL DAN
PINJOL ILEGAL,
FRAKSI PKS
DESAK JATIM
PERKUAT
PERLINDUNGAN
WARGA DI
RUANG DIGITAL**



www.fraksipksjatim.id



fraksipksjatim

DARURAT JUDOL DAN PINJOL ILEGAL, FRAKSI PKS DESAK JATIM

PERKUAT PERLINDUNGAN WARGA DI RUANG DIGITAL

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur menilai maraknya praktik judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) ilegal sudah masuk kategori darurat sosial yang perlu segera direspon dengan langkah hukum yang tegas. Hal ini disampaikan oleh Anggota Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Harisandi Savari, dalam rapat paripurna DPRD Jatim pada Kamis (30/10/2025).

Dalam sidang tersebut, Harisandi menyampaikan Pandangan Umum Fraksi PKS terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Kedua atas Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Ia menilai, pengajuan perubahan perda ini merupakan langkah maju karena menjawab tantangan baru di era digital, terutama terkait fenomena yang belum diakomodasi dalam regulasi sebelumnya, seperti judi online, pinjol ilegal, dan penggunaan pengeras suara berlebihan (sound horeg).



"Fraksi PKS mengapresiasi kebijakan keringanan PKB dan BBNKB yang dipertahankan. Bahkan kami mendorong revisi perda pajak daerah dan retribusi agar keringanan bagi masyarakat yang membutuhkan bisa berlangsung lebih akurat dan berkelanjutan."

Fraksi PKS menilai, keberadaan Raperda tersebut sangat strategis dalam memperluas makna ketenteraman dan ketertiban umum di era digital. Harisandi menjelaskan, praktik judi online dan pinjol ilegal telah menimbulkan banyak kerugian sosial, mulai dari masalah keuangan keluarga, meningkatnya kriminalitas, hingga gangguan kesehatan mental masyarakat.

PKS meminta agar dalam Raperda ini dimasukkan pasal larangan tegas bagi pelaku dan penyebar aktivitas pinjol ilegal dan judi online, termasuk mekanisme pencegahannya yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

"Fraksi PKS juga mengusulkan agar penegakan aturan dimulai dari lingkungan birokrasi, yaitu ASN, pegawai BLUD, dan BUMD. Ini penting sebagai bentuk keteladanan dan langkah nyata mewujudkan pelayanan publik yang bersih dari praktik kejahatan digital," jelasnya.

Selain itu, PKS juga mendorong agar ketentuan patroli digital yang dimuat dalam Raperda dikonsultasikan dengan kementerian terkait agar memiliki dasar hukum yang kuat. Patroli digital ini dinilai penting sebagai upaya deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan di ruang siber, sekaligus melindungi situs dan media sosial yang dikelola pemerintah daerah.



"Masalah judi online dan pinjol ilegal bukan lagi sekadar gangguan kecil, tapi sudah menjadi ancaman terhadap ketenteraman dan moral masyarakat. Karena itu, regulasi baru ini harus memberi perlindungan nyata bagi warga Jawa Timur."

Fraksi PKS juga menyoroti pentingnya edukasi dan rehabilitasi bagi korban pinjol ilegal dan judol. Menurut Harisandi, penyadaran harus dimulai dari keluarga dan sekolah dengan melibatkan generasi muda, khususnya Gen Z, dalam gerakan literasi digital dan keuangan.

"Generasi muda harus diajak menjadi garda depan pencegahan. Mereka paling rentan, tapi juga paling potensial untuk menjadi agen literasi digital yang bisa menyelamatkan masyarakat dari jebakan pinjol dan judol," ujarnya.

Selain isu digital, Fraksi PKS juga menyoroti pentingnya pengaturan penggunaan pengeras suara berlebihan (sound horeg) serta peredaran pangan tercemar dan berbahaya. Keduanya dinilai sebagai bagian penting dari ketenteraman dan ketertiban umum yang harus diatur secara tegas namun tetap memperhatikan pendekatan pembinaan kepada masyarakat.

Di akhir pandangannya, Fraksi PKS berharap agar pembahasan Raperda ini dilakukan secara partisipatif, terbuka, dan melibatkan banyak pihak, termasuk ahli hukum, pakar digital, akademisi, dan masyarakat sipil, agar lahir regulasi yang benar-benar berpihak pada ketenteraman publik.

"Fraksi PKS berharap Raperda ini tidak hanya menjadi produk hukum formal, tetapi benar-benar menjadi instrumen pelindung masyarakat dari ancaman sosial dan digital yang makin kompleks. Semoga langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun Jawa Timur yang lebih tenteram, beretika, dan berkeadaban."

FRAKSI PKS DORONG RAPERDA PENANGGULANGAN BENCANA YANG LEBIH PRESISI, PARTISIPATIF, DAN BERBASIS NILAI GOTONG ROYONG

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Timur menegaskan pentingnya pembaruan regulasi penanggulangan bencana yang lebih presisi, partisipatif, dan berpijakan pada nilai-nilai gotong royong masyarakat Jawa Timur.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS, Dr. Puguh Wiji Pamungkas, dalam penyampaian Pandangan Umum Fraksi PKS terhadap Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur, pada Rapat Paripurna DPRD Jatim, Senin (13/10).

Puguh menilai, perubahan regulasi ini bukan hanya mandat yuridis, tetapi juga kebutuhan strategis untuk memperkuat ketahanan daerah terhadap berbagai ancaman bencana.

“Raperda ini sangat penting untuk memperkuat sistem mitigasi bencana di Jawa Timur agar lebih presisi, optimal, dan integral.”

Kolaborasi Lintas Sektor Harus Lebih Jelas dan Efektif

Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKS menyatakan sepakat terhadap penguatan kolaborasi lintas sektor atau pentahelix dalam penanggulangan bencana.

Namun, PKS menekankan perlunya mekanisme tata kelola kolaborasi (collaborative governance) yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih peran antar-stakeholder.

“Kami mendorong agar kolaborasi ini diatur lebih rinci melalui Peraturan Gubernur, sehingga setiap lembaga, organisasi, dan instansi yang terlibat memiliki peran dan standar yang jelas,” tegasnya.

Integrasi Dokumen dan Transparansi Data Bencana

PKS juga menyoroti pentingnya integrasi dokumen perencanaan bencana, mulai dari Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) hingga Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, dalam satu sistem informasi terpadu.

Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mempermudah pengawasan oleh DPRD dan publik.

Perkuat Komunitas Tangguh dan Gotong Royong Masyarakat

Fraksi PKS juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana), Pesantren Tangguh Bencana (Pestana), dan Keluarga Tangguh Bencana (Katana) secara partisipatif.

“Kami ingin pembentukan komunitas tangguh bencana ini bersifat bottom-up, dengan indikator yang jelas serta dukungan nyata dari pemerintah daerah,” jelas Puguh.

Ia menambahkan, nilai gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Jawa Timur harus menjadi kekuatan sosial utama dalam mitigasi dan penanggulangan bencana.

“Modal sosial seperti gotong royong adalah kekuatan besar yang harus dijaga dan diperkuat dalam sistem penanggulangan bencana,” pungkasnya.

FRAKSI PKS DPRD JATIM DORONG KAJIAN MENDALAM ATAS RAPERDA PENCABUTAN ENAM PERDA



Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur menyampaikan tanggapan atas pendapat Gubernur Jawa Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencabutan Enam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam rapat paripurna, Kamis (23/10/2025).

Tanggapan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PKS, Khusnul Khuluk. Dalam kesempatan itu, Fraksi PKS menyampaikan apresiasi kepada Gubernur atas pendapat dan catatan yang diberikan terhadap usul prakarsa DPRD mengenai pencabutan enam perda. Fraksi PKS menilai, masukan tersebut akan menjadi bahan penting untuk penyempurnaan Raperda agar memiliki dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis yang kuat.

Khusnul menjelaskan, Gubernur pada prinsipnya sependapat dengan pencabutan lima dari enam perda yang diajukan, yakni tentang perlindungan dan penataan pasar, pengendalian kelebihan muatan, perfilman, pertambangan golongan C, serta tata kelola pupuk organik.

Sementara terhadap Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bandara Abdulrachman Saleh Malang, Gubernur berpendapat tidak perlu dilakukan pencabutan, merujuk pada surat Kementerian Perhubungan yang menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih memiliki kewenangan pengelolaan bandara tersebut sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Menanggapi hal ini, Fraksi PKS mendorong adanya kajian mendalam dan konsultasi bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perhubungan untuk memperoleh titik temu terhadap pengelolaan Bandara Abdulrachman Saleh Malang. Fraksi PKS juga menilai penting untuk meninjau kembali apakah terdapat perubahan keputusan menteri setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa urusan penerbangan merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Selain itu, Fraksi PKS meminta agar pemerintah provinsi menyajikan data strategis terkait rencana pengelolaan bandara dalam jangka menengah, proyeksi kerja sama dengan BUMN, BUMD, dan swasta, serta strategi pengendalian dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat sekitar kawasan bandara.

Untuk lima perda yang disepakati dicabut, Fraksi PKS memberikan sejumlah catatan penting. Pemerintah Provinsi diharapkan tetap memberikan pembinaan kepada kabupaten dan kota agar keberadaan pasar tradisional dan toko kelontong tetap terlindungi di tengah berkembangnya pasar modern. Dalam hal pengendalian kelebihan muatan angkutan barang, Fraksi PKS mendorong penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat agar fungsi jembatan timbang berjalan optimal.

Fraksi PKS juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku industri kreatif agar perfilman di Jawa Timur tetap berkembang dalam bingkai edukatif dan berlandaskan nilai budaya serta agama. Di sektor pertambangan, Fraksi PKS mengingatkan agar pengelolaan bahan galian tetap memperhatikan aspek lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat sekitar. Sementara untuk pengelolaan pupuk organik, Fraksi PKS meminta adanya koordinasi intensif dengan berbagai pihak agar distribusi pupuk di Jawa Timur tetap tepat sasaran dan tidak menimbulkan kelangkaan.

Fraksi PKS menegaskan bahwa setiap langkah pencabutan perda harus diikuti dengan strategi tindak lanjut yang jelas agar tidak menimbulkan kekosongan regulasi maupun dampak negatif terhadap masyarakat. "Raperda ini harus menjadi instrumen yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Timur," ujar Khusnul. Fraksi PKS juga berharap pembahasan Raperda ini dapat menghasilkan regulasi yang berkualitas, berdaya guna, dan berhasil guna dalam mendukung efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan pemerintahan provinsi ke depan. "Semoga Allah SWT meridai ikhtiar dan langkah kita semua," tutup Khusnul.



"Raperda ini harus menjadi instrumen yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Timur."

SILATURAHIM LPRCPM KE FRAKSI PKS JATIM, BAHAS PEMBINAAN ANAK MUDA DI SURABAYA



Fraksi PKS DPRD Jawa Timur menerima kunjungan silaturahim dari keluarga besar Lembaga Pengembangan Cabang Ranting dan Pembinaan Masjid (LPRCPM) Kota Surabaya pada Kamis (2/10/2025).

Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Ketua Fraksi PKS Jatim yang juga Anggota DPRD Jawa Timur dari dapil Surabaya, Lilik Hendarwati.

Pertemuan yang berlangsung hangat itu berbincang seputar kontribusi Muhammadiyah dalam pembangunan masjid Muhammadiyah di Surabaya, sekaligus upaya memperkuat sinergi dalam pembinaan generasi muda.

“Alhamdulillah, pagi ini saya menerima rombongan dari LPRCPM Surabaya. Kami berkenalan dengan banyak pengurus Muhammadiyah yang selama ini aktif memperjuangkan pembangunan masjid-masjid. Itu adalah bagian nyata dari kontribusi Muhammadiyah Surabaya untuk kota ini,” ujar Lilik.

Menurut Lilik, ada kesamaan visi antara Muhammadiyah dan PKS, yaitu sama-sama ingin memberikan kontribusi terbaik bagi umat. Karena itu, pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi, khususnya dalam pembinaan anak-anak muda dan kegiatan dakwah sosial.

"Kami berbincang bagaimana bisa bersinergi dalam menguatkan Surabaya, utamanya dalam pembinaan anak muda dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Kolaborasi seperti ini sangat penting agar semakin banyak memberi manfaat luas bagi masyarakat," jelasnya.

Lilik menambahkan, peran anak muda hari ini sangat krusial karena mereka adalah generasi penerus yang akan menentukan wajah Surabaya di masa depan.

"Pemuda harus diberi ruang untuk berkembang, diarahkan dengan nilai-nilai kebaikan, dan dibekali dengan kegiatan yang produktif. Kalau anak muda kuat, Surabaya dan Indonesia juga akan kuat," tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pembinaan anak muda bukan hanya tanggung jawab keluarga atau lembaga pendidikan, tetapi juga memerlukan dukungan dari semua elemen masyarakat.

"Inilah mengapa PKS ingin terus bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat lainnya, agar pembinaan anak-anak muda semakin terarah, membangun karakter, dan melahirkan generasi yang tangguh, berakhlak, serta cinta pada dakwah dan bangsa," pungkasnya.



"Inilah mengapa PKS ingin terus bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat lainnya, agar pembinaan anak-anak muda semakin terarah, membangun karakter, dan melahirkan generasi yang tangguh, berakhlak, serta cinta pada dakwah dan bangsa,".



Ketua Fraksi PKS
DPRD Provinsi
Jawa Timur

HJ. LILIK HENDARWATI

KOMISI C
(KEUANGAN)

BADAN ANGGARAN (BANGGAR)
BADAN MUSYAWARAH (BAMUS)



LILIK HENDARWATI APRESIASI PEMKOT SURABAYA, BERHARAP PROGRAM RP 5 JUTA UNTUK PER RW DORONG PEMUDA AKTIF

Anggota DPRD Jawa Timur dari Dapil Surabaya, Lilik Hendarwati, memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya atas kebijakan baru yang menyalurkan anggaran Rp 5 juta untuk setiap RW mulai tahun 2026. Program ini bertujuan mendukung kegiatan positif anak muda, khususnya generasi Z, sekaligus menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini.

Kebijakan yang digagas Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, itu akan melibatkan RT, RW, dan orang tua dalam proses pengawasan agar kegiatan yang dilakukan para pemuda benar-benar mencerminkan semangat gotong royong, solidaritas, dan nasionalisme, nilai-nilai utama dalam Pancasila.

Lilik menyebut langkah Pemkot ini sebagai kebijakan strategis yang patut diapresiasi karena menyentuh langsung akar pembinaan karakter generasi muda di tingkat lingkungan.

"Sebagai anggota DPRD Jatim dari Dapil Surabaya, saya menyambut positif keputusan Wali Kota Surabaya yang memberikan alokasi dana Rp 5 juta per RW untuk mendukung kegiatan generasi muda. Ini merupakan langkah nyata yang strategis dalam memperkuat pembangunan sosial budaya," ujar Lilik Hendarwati, yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur.



Menurutnya, dukungan finansial tersebut bukan hanya bentuk perhatian terhadap anak muda, tetapi juga sarana efektif untuk menggerakkan partisipasi aktif pemuda di lingkungan mereka sendiri.

"Kebijakan ini sejalan dengan semangat Sumpah Pemuda 1928 yang menegaskan pentingnya peran strategis pemuda dalam membangun bangsa. Melalui dukungan ini, diharapkan tumbuh kreativitas, nasionalisme, dan kebersamaan di kalangan pemuda Surabaya," tuturnya.

Namun, Lilik juga mengingatkan pentingnya memastikan agar dana tersebut digunakan secara transparan dan tepat sasaran.

"Kami menitipkan kepada teman-teman Fraksi PKS di DPRD Surabaya untuk melakukan pengawasan ketat. Dana ini harus dikelola dengan akuntabel dan diarahkan untuk kegiatan yang benar-benar membangun karakter dan potensi generasi muda," tegasnya.

Lilik juga menyerukan agar para pemuda tidak sekadar menjadi penerima manfaat, tetapi menjadi motor penggerak kegiatan positif di masyarakat.

Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah dan generasi muda akan menjadi pondasi penting bagi kemajuan Surabaya.

"Semoga sinergi antara pemerintah dan pemuda ini mampu membawa dampak nyata bagi kemajuan, persatuan, dan kesejahteraan warga Surabaya," pungkasnya.



"Saya mengajak seluruh pemuda Surabaya untuk memanfaatkan peluang ini dengan menghadirkan ide dan inovasi terbaik. Jadikan program ini sebagai wadah berlatih kepemimpinan, menumbuhkan solidaritas, dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan."



DANA TRANSFER DIPANGKAS RP2,8 TRILIUN, LILIK HENDARWATI DUKUNG USULAN TAMBAHAN ANGGARAN RP10 TRILIUN: INVESTASI STRATEGIS UNTUK RAKYAT JAWA TIMUR

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengajukan usulan program pembangunan senilai Rp10,047 triliun kepada pemerintah pusat. Langkah ini diambil sebagai strategi untuk mengantisipasi dampak pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dipangkas sebesar Rp2,8 triliun dalam rencana anggaran tahun 2026.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menilai bahwa langkah Pemprov Jatim cukup realistik, mengingat besarnya kebutuhan pembangunan di daerah dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia ini.

"Jawa Timur memiliki 38 kabupaten/kota dengan kebutuhan pembangunan yang sangat besar, mulai dari infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, hingga pemerataan ekonomi," ujar Ketua Fraksi PKS Jatim itu.

Lilik menjelaskan, pengurangan TKD sebesar Rp2,8 triliun ditambah turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp4,2 triliun akibat implementasi UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), jelas berdampak pada kemampuan fiskal daerah.

"Kondisi ini bisa menyebabkan keterlambatan berbagai program prioritas. Karena itu, permintaan tambahan anggaran Rp10 triliun dari Sekdaprov perlu dilihat sebagai investasi strategis, bukan sekadar tambahan dana," tegasnya.

Menurut Lilik, fokus penggunaan dana tambahan harus diarahkan pada empat prioritas utama. Pertama, pembangunan infrastruktur penghubung wilayah selatan dan kepulauan. Kedua, program pengentasan kemiskinan terpadu. Ketiga, penguatan layanan pendidikan dan kesehatan, dan keempat pemberdayaan ekonomi rakyat dan UMKM.

Legislator PKS asal Dapil Surabaya ini menegaskan bahwa Fraksi PKS DPRD Jatim mendukung langkah tersebut, sepanjang perencanaan dilakukan dengan matang serta disertai prinsip transparansi dan akuntabilitas tinggi.

“Kami juga mendorong adanya sinergi kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, agar setiap rupiah benar-benar berdampak bagi rakyat,” ujarnya.

Lilik menutup dengan penegasan bahwa permintaan tambahan dana ini bukan bentuk ketergantungan daerah, melainkan bagian dari tanggung jawab bersama untuk memastikan kesejahteraan 40 juta warga Jawa Timur.

“Jawa Timur membutuhkan perhatian khusus dari pusat, bukan karena bergantung, tapi karena ini tanggung jawab bersama untuk pemerataan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.



***“Jawa Timur
membutuhkan perhatian
khusus dari pusat, bukan
karena bergantung, tapi
karena ini tanggung
jawab bersama untuk
pemerataan dan
kesejahteraan
masyarakat.”***



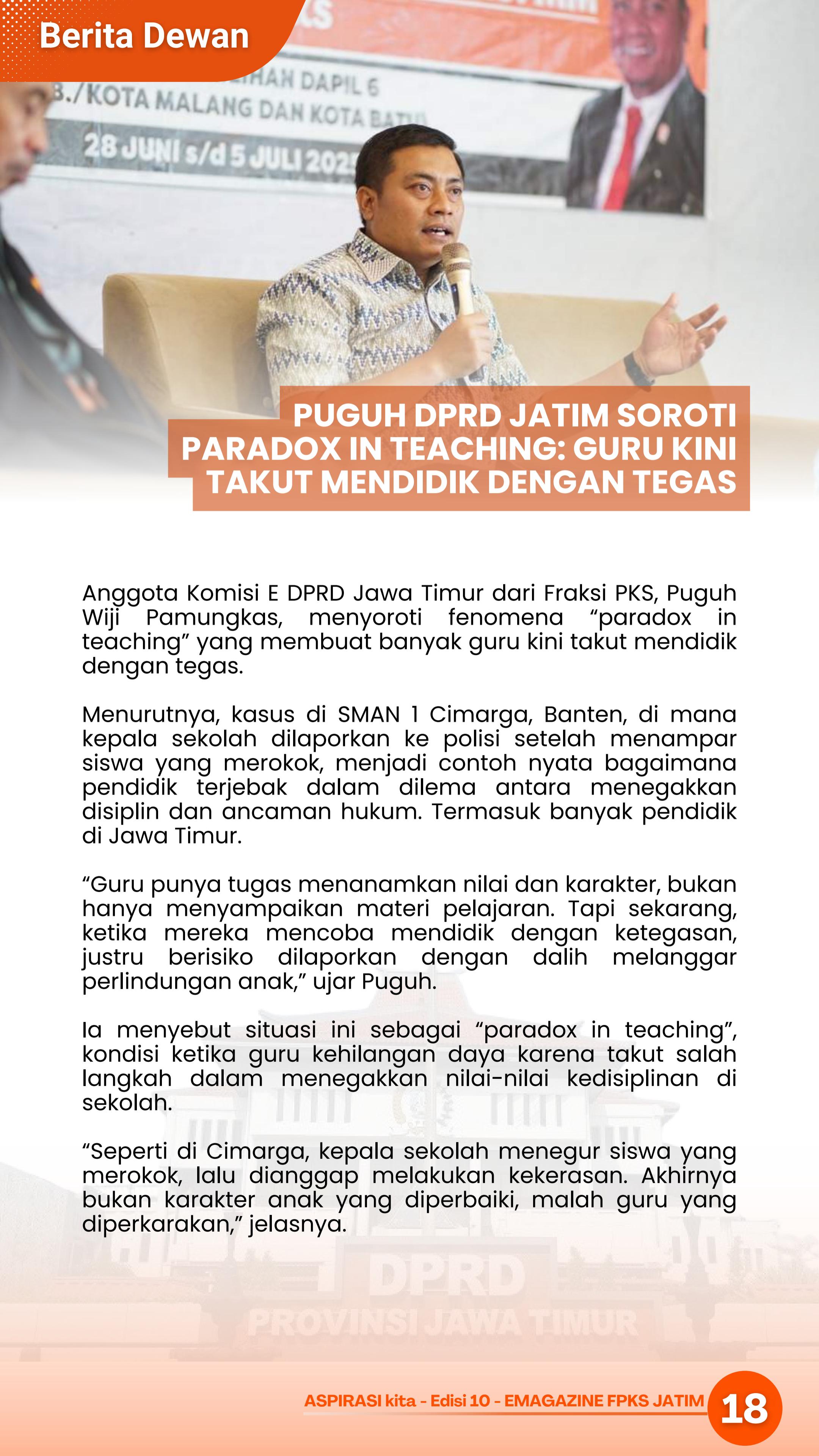
Sekretaris Fraksi PKS
DPRD Provinsi
Jawa Timur

**Dr. H. Puguh Wiji
Pamungkas, MM**

**KOMISI E
(KESRA)**

BADAN KEHORMATAN (BK)





PUGUH DPRD JATIM SOROTI PARADOX IN TEACHING: GURU KINI TAKUT MENDIDIK DENGAN TEGAS

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur dari Fraksi PKS, Puguh Wiji Pamungkas, menyoroti fenomena “paradox in teaching” yang membuat banyak guru kini takut mendidik dengan tegas.

Menurutnya, kasus di SMAN 1 Cimarga, Banten, di mana kepala sekolah dilaporkan ke polisi setelah menampar siswa yang merokok, menjadi contoh nyata bagaimana pendidik terjebak dalam dilema antara menegakkan disiplin dan ancaman hukum. Termasuk banyak pendidik di Jawa Timur.

“Guru punya tugas menanamkan nilai dan karakter, bukan hanya menyampaikan materi pelajaran. Tapi sekarang, ketika mereka mencoba mendidik dengan ketegasan, justru berisiko dilaporkan dengan dalih melanggar perlindungan anak,” ujar Puguh.

Ia menyebut situasi ini sebagai “paradox in teaching”, kondisi ketika guru kehilangan daya karena takut salah langkah dalam menegakkan nilai-nilai kedisiplinan di sekolah.

“Seperti di Cimarga, kepala sekolah menegur siswa yang merokok, lalu dianggap melakukan kekerasan. Akhirnya bukan karakter anak yang diperbaiki, malah guru yang diperkarakan,” jelasnya.

Puguh menilai, fenomena semacam ini tidak hanya terjadi di Banten, melainkan juga berpotensi terjadi di banyak sekolah di Jawa Timur. Ia mengingatkan bahwa dunia pendidikan kini menghadapi persoalan serius ketika pendidik kehilangan keberanian untuk bertindak.

"Beberapa waktu lalu kami di DPRD Jatim juga didatangi para guru. Mereka mengeluhkan hal yang sama, tidak berani menegur dan menindak siswa, khawatir dilaporkan ke polisi," ujarnya.

Menurutnya, jika guru terus dihantui ketakutan, bagaimana mereka bisa menanamkan karakter disiplin dan sopan santun pada murid? "Ini bahaya bagi masa depan pendidikan kita," katanya.

Untuk itu, Puguh mendorong pemerintah pusat dan DPR agar merevisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 serta Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005.

Menurutnya, kedua regulasi itu perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan hukum, terutama agar tidak bertabrakan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak maupun HAM.

"Guru butuh payung hukum yang jelas, agar tidak gamang ketika menjalankan tugas profesionalnya. Undang-undang yang ada harus bisa menjamin rasa aman, perlindungan dari intimidasi, serta memberikan bantuan hukum ketika mereka menghadapi masalah," ujarnya.

Legislator PKS ini menegaskan, negara harus hadir melindungi guru yang berjuang membentuk karakter anak bangsa. "Jangan biarkan guru merasa sendirian. Kalau guru takut mendidik dengan tegas, siapa yang akan menjaga moral generasi kita?" pungkasnya.



"Guru butuh payung hukum yang jelas, agar tidak gamang ketika menjalankan tugas profesionalnya. Negara harus hadir melindungi guru yang berjuang membentuk karakter anak bangsa."

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menilai bahwa rencana pemerintah pusat untuk meluncurkan Sekolah Garuda sebagai wadah bagi anak-anak berprestasi adalah langkah positif untuk memperkuat kualitas pendidikan nasional. Namun demikian, ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebenarnya sudah lebih dulu menjalankan konsep serupa melalui jaringan sekolah unggulan yang tersebar di berbagai daerah.

Menurut Puguh, sekolah-sekolah unggulan yang dibentuk Pemprov Jatim sudah berfungsi sebagai lembaga pendidikan dengan kurikulum, karakter, dan pembinaan khusus untuk mencetak generasi muda yang unggul dan berdaya saing tinggi.

"Sebenarnya di Jawa Timur sudah ada sejak lama sekolah-sekolah unggulan yang menjadi model pendidikan berkarakter dan berprestasi. Ada enam sekolah Taruna yang bekerja sama dengan berbagai instansi, baik militer maupun sipil," jelas Puguh, yang juga Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim.

Puguh kemudian merinci enam sekolah unggulan tersebut, yaitu SMAN Taruna Nala Malang, bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut, SMAN 3 Taruna Angkasa Madiun, bekerja sama dengan TNI Angkatan Udara, SMAN 2 Taruna Bhayangkara Banyuwangi, bermitra dengan Polri, SMAN 5 Taruna Brawijaya Kediri, bekerja sama dengan TNI



**PUGUH WIJI
PAMUNGKAS: SEKOLAH
UNGGULAN JATIM BISA
JADI PROTOTIPE
SEKOLAH GARUDA
NASIONAL**

"Enam sekolah ini sudah terbukti menghasilkan siswa dengan karakter kuat, disiplin, dan daya saing tinggi. Karena itu, saya kira Jawa Timur bisa menjadi prototipe nasional untuk pengembangan Sekolah Garuda," ujar legislator asal Jember ini. Menurut Puguh, konsep Sekolah Garuda yang digagas pemerintah pusat di bawah program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dapat memperkuat sinergi antara pusat dan daerah, dengan menjadikan model Jawa Timur sebagai acuan.

"Kalau pemerintah pusat ingin memperkuat sekolah unggulan nasional lewat Sekolah Garuda, maka Jawa Timur bisa jadi contoh nyata yang sudah berjalan baik. Tinggal diperluas dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah lain," paparnya. Lebih jauh, Puguh menjelaskan bahwa tantangan pendidikan Indonesia kini bukan lagi sekadar pemerataan akses atau mengatasi buta huruf, melainkan meningkatkan kualitas dan daya saing generasi muda.

"Isu pendidikan hari ini bukan lagi soal tidak sekolah, tapi bagaimana memastikan anak-anak kita di seluruh Indonesia bisa mendapatkan pendidikan yang benar-benar berkualitas. Mereka harus punya karakter, kompetensi, dan integritas untuk bersaing di tingkat global," tegasnya. Legislator muda dari PKS ini menilai bahwa penguatan sekolah-sekolah unggulan seperti yang dilakukan di Jawa Timur merupakan bentuk investasi jangka panjang bagi bangsa. "Kalau ingin membangun Indonesia yang kuat, kita harus menyiapkan generasi yang unggul sejak dini. Pendidikan yang membentuk karakter dan kompetensi itulah kuncinya," pungkas Puguh.



"Kalau ingin membangun Indonesia yang kuat, kita harus menyiapkan generasi yang unggul sejak dini. Pendidikan yang membentuk karakter dan kompetensi itulah kuncinya."



Bendahara Fraksi PKS
DPRD Provinsi
Jawa Timur



HARISANDI SAVARI, S.PT, ST

**KOMISI D
(PEMBANGUNAN)
BADAN MUSYAWARAH (BAMUS)**



HARISANDI DORONG PROMOSI WISATA TERPADU SUMENEP, KUNCI DONGKRAK EKONOMI MADURA

Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) dari dapil Madura, Harisandi Savari, menekankan pentingnya promosi wisata terpadu di Kabupaten Sumenep. Menurutnya, langkah ini strategis untuk mendongkrak perekonomian Madura yang kaya potensi alam dan budaya.

Harisandi menilai, selama ini Sumenep masih identik dengan Keraton sebagai ikon utama. Padahal, kabupaten paling timur di Pulau Madura tersebut menyimpan banyak destinasi lain yang tak kalah menarik.

“Keraton penting, itu warisan budaya. Tapi Sumenep juga punya pantai-pantai dan pulau yang luar biasa, dari Lombang, Slopeng, hingga Gili Labak dan Gili Iyang. Ini harus dijadikan paket wisata terpadu sehingga pengunjung tidak hanya mampir sebentar,” ujar Harisandi.

Selain keraton, sejumlah destinasi unggulan lainnya juga berpotensi besar menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Pantai Lombang dan Slopeng terkenal dengan pasir putihnya, Gili Labak dan Gili Iyang menjadi magnet bagi wisatawan pencinta snorkeling, sementara Goa Soekarno, Puncak Lanjari, kawasan mangrove, hingga



Harisandi juga menekankan pentingnya standarisasi pengelolaan destinasi wisata, mulai dari kebersihan, fasilitas, hingga keamanan. Menurutnya, peningkatan lama tinggal wisatawan akan memberi dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat.

"Kalau promosi dan pengelolaan ini berjalan baik, ekonomi Madura pasti terdongkrak. Wisatawan datang bukan hanya untuk melihat keraton, tapi juga untuk menikmati laut, pulau, budaya, dan keramahan masyarakatnya. Inilah momentum menjadikan Sumenep sebagai surga wisata Madura," tandas legislator PKS ini.

Meski belum ada tanggapan resmi dari Dinas Pariwisata Jatim, Pemkab Sumenep menunjukkan keseriusan dengan menaikkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata dan menyiapkan regulasi Raperda Desa Wisata.

Harisandi menilai langkah ini perlu didukung penuh Pemprov Jatim agar promosi wisata Madura semakin masif dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Data kunjungan wisata Kabupaten Sumenep tahun 2024 mencatat lebih dari 1,7 juta wisatawan domestik dan ratusan wisatawan mancanegara. Lonjakan signifikan juga terlihat pada libur Natal dan Tahun Baru, dengan kunjungan mencapai 140 ribu orang.

Meski terdapat variasi angka dari beberapa sumber, tren pertumbuhan tetap menunjukkan peluang besar.

"Yang penting adalah konsolidasi data dan penguatan manajemen. Kalau ini dikerjakan serius, pariwisata bisa jadi motor penggerak ekonomi Madura," pungkas Harisandi.

Yang penting adalah konsolidasi data dan penguatan manajemen. Kalau ini dikerjakan serius, pariwisata bisa jadi motor penggerak ekonomi Madura.



HARISANDI DPRD JATIM: TOL TRANS MADURA HARUS JADI PEMBANGUNAN YANG BERPIHKAK PADA RAKYAT, BUKAN SEKADAR PROYEK FISIK

Anggota DPRD Jawa Timur dari Dapil Madura, Harisandi Savari, menegaskan bahwa rencana pembangunan Tol Trans Madura harus benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat Madura, bukan sekadar menjadi proyek infrastruktur fisik tanpa arah kesejahteraan rakyat.

Hal itu disampaikan Harisandi dalam kegiatan "FPKS Bicara" yang digelar secara daring pada Kamis (30/10/2025). Dalam forum tersebut, Harisandi menyampaikan pandangannya terkait urgensi, tantangan, dan harapan terhadap rencana pembangunan jalan tol yang akan menghubungkan empat kabupaten di Madura, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.

"Tol ini jangan hanya dilihat sebagai proyek beton semata. Harus jadi bagian dari pembangunan yang berkelanjutan, yang betul-betul meningkatkan kesejahteraan masyarakat Madura," ujar legislator PKS itu.

Menurutnya, proyek Tol Trans Madura dengan panjang sekitar 130 hingga 150 kilometer diharapkan menjadi tonggak kemajuan baru bagi Pulau Madura. Namun, ia mengingatkan bahwa hingga kini banyak masyarakat masih bertanya-tanya mengenai kejelasan proyek tersebut, mulai dari jadwal pembangunan hingga mekanisme pendanaannya.



"Tol ini jangan hanya dilihat sebagai proyek beton semata. Harus jadi bagian dari pembangunan yang berkelanjutan, yang betul-betul meningkatkan kesejahteraan masyarakat Madura."

"Sejak 2023 sampai awal 2025, proyek ini masih belum jelas. Banyak warga yang bertanya, apakah tol ini benar-benar akan terwujud atau hanya wacana?" katanya.

Harisandi menyoroti sejumlah kendala klasik yang menghambat percepatan proyek, seperti pembebasan lahan dan keterbatasan pendanaan. Dari kajian yang pernah ia pelajari, kebutuhan investasi proyek ini mencapai Rp22,17 triliun, jumlah yang cukup besar dan belum layak secara finansial tanpa dukungan pemerintah pusat.

"Komisi D DPRD Jatim juga melihat persoalan utama ada di pembebasan lahan dan pendanaan. Karena itu, perlu sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah agar proyek ini bisa berjalan," tegasnya.

Meski demikian, Harisandi tetap optimistis bahwa keberadaan tol ini dapat menjadi simbol pemerataan pembangunan antara Madura dan wilayah Jawa. Ia berharap pembangunan ini tidak hanya memperlancar mobilitas, tetapi juga membuka peluang baru di sektor perdagangan, industri lokal, garam, tembakau, dan hasil laut.

"Kalau dikelola dengan baik, tol ini bisa membuka lapangan kerja baru dan memperkuat ekonomi daerah. Harapannya, pembangunan Madura tidak lagi tertinggal dan masyarakatnya bisa ikut menikmati hasil kemajuan," pungkasnya.

"Kalau dikelola dengan baik, tol ini bisa membuka lapangan kerja baru dan memperkuat ekonomi daerah. Harapannya, pembangunan Madura tidak lagi tertinggal dan masyarakatnya bisa ikut menikmati hasil kemajuan."



Anggota Fraksi PKS
DPRD Provinsi
Jawa Timur

H AGUS CAHYONO, SHI, MHI

**KOMISI A
(PEMERINTAHAN)**

**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH (BAPEMPERDA)**





Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Agus Cahyono, menegaskan bahwa pengawasan di lingkup Pemerintah Provinsi Jatim belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan minimnya dukungan anggaran bagi Inspektorat Jatim yang menjadi ujung tombak pengawasan.

Pernyataan itu ia sampaikan usai rapat kerja Komisi A dengan mitra, salah satunya Inspektorat Jatim, pada Rabu (1/10).

"Komitmen Komisi A adalah memastikan pengawasan di lingkup Jatim bisa berjalan maksimal. Artinya peran Inspektorat harus dimaksimalkan sebagai langkah antisipasi agar Pemprov Jatim berjalan baik dan tidak ada temuan penyelewengan," ujar legislator PKS itu.

Namun, Agus menilai alokasi anggaran saat ini jauh dari kebutuhan ideal. Dengan APBD Jatim di atas Rp10 triliun, seharusnya minimal 0,30% dialokasikan untuk fungsi pengawasan. Faktanya, Inspektorat Jatim baru menerima sekitar 0,10%.

"Ini sangat rendah. Harapan kita ada tambahan anggaran untuk Inspektorat supaya proses pengawasan bisa lebih baik," tegasnya.

Ia menambahkan, Inspektorat kini juga mendapat tugas tambahan dari pemerintah pusat, yakni mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP). Dengan mandat baru ini, kebutuhan penguatan anggaran semakin mendesak.

"Apalagi dengan tambahan poin pengawasan tersebut, support anggaran harus ditingkatkan. Bahkan 0,30% itu sebenarnya angka minimal. Kalau masih 0,10% jelas tidak cukup," kata Agus.

Komisi A DPRD Jatim, lanjut Agus, akan terus mendorong peningkatan anggaran Inspektorat agar fungsi pengawasan berjalan optimal, sehingga program-program Pemprov Jatim bisa terlaksana dengan akuntabel dan terhindar dari penyelewengan.



"Apalagi dengan tambahan poin pengawasan tersebut, support anggaran harus ditingkatkan. Bahkan 0,30% itu sebenarnya angka minimal. Kalau masih 0,10% jelas tidak cukup."



AGUS CAH APRESIASI KENAIKAN UMK DI 7 DAERAH, DORONG PEMERATAAN KE SELURUH JAWA TIMUR



Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menaikkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di tujuh daerah. Kebijakan ini mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Agus Cahyono, yang menilai langkah Gubernur Khofifah Indar Parawansa sebagai bentuk keberpihakan terhadap buruh di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Kenaikan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/771/013/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2025. Adapun tujuh daerah yang mengalami kenaikan UMK adalah Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, dan Kota Malang.

"Keputusan gubernur ini tentu patut diapresiasi. Di tengah kondisi ekonomi yang masih lesu, kebijakan ini menunjukkan keberpihakan kepada para buruh," ujar Agus Cahyono, yang juga anggota Fraksi PKS DPRD Jatim.

Namun demikian, Agus berharap kebijakan serupa juga bisa diterapkan di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur. Menurutnya, meski tingkat industri dan produktivitas antarwilayah berbeda-beda, seluruh buruh di Jawa Timur layak mendapatkan peningkatan kesejahteraan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

"Memang keputusan ini baru berlaku di tujuh kabupaten/kota, mungkin ada pertimbangan tertentu dari pemerintah provinsi. Tapi harapan kami, kenaikan UMK ini bisa dirasakan oleh seluruh 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, walau dengan proporsi yang menyesuaikan kemampuan daerah," tambahnya.

Agus Cah juga menekankan pentingnya pemerataan kebijakan ekonomi agar tidak menimbulkan kesenjangan kesejahteraan antarwilayah. Ia mendorong Pemprov Jatim bersama Dewan Pengupahan Daerah untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap kondisi ekonomi di daerah-daerah lain.

"Kesejahteraan buruh tidak boleh hanya terpusat di wilayah industri besar seperti Surabaya, Gresik, atau Sidoarjo. Di daerah lain juga banyak tenaga kerja yang bergantung pada upah minimum. Karena itu, kenaikan UMK yang adil dan merata menjadi harapan kita bersama," tutupnya.



"Kesejahteraan buruh tidak boleh hanya terpusat di wilayah industri besar seperti Surabaya, Gresik, atau Sidoarjo. Di daerah lain juga banyak tenaga kerja yang bergantung pada upah minimum. Karena itu, kenaikan UMK yang adil dan merata menjadi harapan kita bersama."



Anggota Fraksi PKS
DPRD Provinsi
Jawa Timur

DRS. H. M KHUSNUL KHULUK

**KOMISI B
(PEREKONOMIAN)
BADAN ANGGARAN (BANGGAR)**



APBD UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

Oleh: Khusnul Khuluk, Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari PKS

Saat ini DPRD bersama gubernur Provinsi Jawa timur sedang membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) tahun anggaran 2025. Sebagaimana disebutkan dalam pengantar nota keuangan Perubahan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025, secara eksplisit saudari Gubernur menyampaikan bahwa pembahasan dan penyusunan Raperda P-APBD tahun anggaran 2025 dihadapkan pada situasi dan kondisi Geo-ekonomi global yang tidak bersahabat dan penuh dengan ketidakpastian.



Untuk Menekan Laju Inflasi, Bank Sentral di banyak negara melakukan pengetatan kebijakan moneter secara agresif. Selain itu, persoalan perang tarif dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat, secara langsung maupun tidak langsung tentu akan berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi global mengalami saat ini mengalami stagnasi pada angka 3,0% pada tahun 2025 dan 3,1% pada tahun 2026. Kondisi global ini tentu saja berpengaruh pada ekonomi nasional dan daerah, termasuk bagi perekonomian Provinsi Jawa Timur.

Perekonomian Jawa Timur pada Triwulan II 2025 tumbuh sebesar 5,23% (y-o-y) lebih tinggi dibanding Nasional. Jawa Timur juga mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Jawa yang mencapai 3,09 persen (q-to-q), diikuti Jawa Barat 2,33, Jawa Tengah 1,87 dan DKI Jakarta 1,60. Jawa Timur merupakan penyumbang terbesar kedua bagi perekonomian Pulau Jawa sebesar 25,36% dan juga penyumbang terbesar kedua bagi perekonomian nasional sebesar 14,44%.

Struktur utama ekonomi Jawa Timur ditopang oleh 3 sektor utama, yaitu industri sebesar 31,25 persen, perdagangan sebesar 18,44 persen, dan pertanian sebesar 10,87 persen. Dampak ekonomi global dan nasional di atas, cukup berpengaruh pada kondisi ekonomi di daerah. Saat beberapa harga-harga Sembako, barang dan jasa mengalami kenaikan, sementara pendapatan masyarakat stagnan. Sehingga akan berakibat pada daya beli masyarakat akan semakin lemah. Beban masyarakat saat ini semakin berat.

Karena itu, rancangan APBD perubahan tahun anggaran 2025 ini harus lebih responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi masyarakat real. Bagaimana P-APBD 2025 ini mampu memberi kontribusi bagi keringanan sosial-ekonomi masyarakat yang melemah saat ini. Komposisi dan alokasi APBD tentu saja harus menyesuaikan realitas yang aktual dan faktual saat ini. Program kompensasi atau bantalan sosial, jangan hanya sekedar "permen pemanis" yang berjangka pendek. Kondisi eksternal di atas, selain tak berkepastian juga memiliki dampak berjangka panjang bagi kehidupan masyarakat.

Kebijakan pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2025 juga ikut berdampak pada struktur dan komposisi penyusunan Perubahan APBD 2025 ini, terutama pada aspek belanja daerah yang dituntut untuk melakukan adaptasi, baik rasionalisasi maupun realokasi dan distribusi ke pos-pos yang menjadi prioritas pembangunan yang berdampak langsung pada kebutuhan dan kepentingan hajat hidup orang banyak. Kebijakan efisiensi di daerah harus tepat sasaran dan produktif serta tidak akan menganggu pertumbuhan ekonomi daerah.

PERANGKAAN P-APBD 2025

Pendapatan Daerah secara keseluruhan mengalami perubahan cukup signifikan. Pendapatan daerah pada Perubahan ini yang semula di diproyeksikan sebesar Rp 28,448 Triliun lebih berubah menjadi Rp 28,539 Triliun lebih, mengalami kenaikan sebesar Rp 91,182 miliar lebih, dengan rincian sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah : Rp 17,43 triliun lebih; Pendapatan Transfer sebesar Rp 11,467 Triliun Rupiah lebih, dan Lan-lain Pendapatan daerah yang sah, dianggarkan tetap atau tidak mengalami perubahan, yakni sebesar 28 miliar.

Sementara belanja. Karakter P-APBD tahun anggaran 2025 masih besar pasak daripada tiang; sisi pengeluaran jauh lebih besar daripada penerimaan. Belanja Daerah, semula dianggarkan sebesar Rp 30,570 Triliun lebih, berubah menjadi sebesar Rp 32,936 Triliun lebih atau bertambah sebesar Rp 2,712 triliun lebih. Karena belanja daerah lebih besar daripada target pendapatan daerah, maka terjadi DEFISIT yang semula dianggarkan sebesar Rp 1,775 triliun lebih, berubah menjadi 4 triliun 397 miliar 87 juta 444 ribu rupiah lebih atau bertambah sebesar Rp 2,621 lebih.

Defisit anggaran ini akan ditutup dengan pembiayaan netto yang berasal dari selisih antara penerimaan biaya daerah dengan pengeluaran daerah. Sehingga terdapat Pembiayaan Netto sebesar Rp 4,397 triliun lebih, yang akan digunakan untuk menutup defisit anggaran. Salah satu yang perlu dikritisi adalah, masih besarnya angka sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA). Terhadap perubahan penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 2024 menjadi Rp 4,706 triliun lebih dalam rancangan P-APBD 2025, penulis menilai tingginya angka SiLPA ini harus menjadi warning bagi pemerintah Provinsi dalam pengelolaan P-APBD 2025 agar tidak terulang lagi sampai akhir tahun anggaran.

Perbaikan perencanaan, pencermatan realisasi khususnya pada prosedur proyek/ lelang kegiatan belanja daerah dan pengadaaan barang dan jasa harus diperbaiki agar dana yang mengendap akibat tingginya APBD yang tidak terserap yang akan menjadi SiLPA dapat diantisipasi. Di sisi lain, penggunaan SiLPA ini harus benar-benar dipakai untuk belanja pada program kegiatan yang menyentuh langsung hajat hidup warga Jawa Timur, dengan mendorong peningkatan belanja modal, belanja barang-jasa yang diserahkan kepada masyarakat, belanja hibah/ bansos, belanja subdisi serta dapat dipertimbangkan untuk peningkatan investasi daerah dengan perencanaan untuk pendirian atau revitalisasi BUMD, peningkatan belanja sektor pembangunan ketahanan keluarga, peningkatan belanja sektor pertanian dan kelautan / perikanan serta peningkatan belanja sektor pendidikan dan kesehatan yang dinikmati langsung oleh masyarakat.

PERANGKAAN P-APBD 2025

Anggaran pada dasarnya hanya merupakan sebuah instrument dan bukan tujuan. Anggaran adalah instrument yang dapat digunakan untuk mewujudkan tujuan pembangunan, yakni kesejahteraan masyarakat. Penekanan ini penting karena sering sekali kita terjebak pada persoalan teknis anggaran itu sendiri. Perubahan angka-angka dalam setiap pos anggaran harus dimaknai bukan sekedar sebagai alat untuk memuaskan para pengguna anggaran.

Perubahan angka-angka harus dimaknai sebagai cerminan dari tekad untuk merealisasikan sasaran pembangunan, khususnya di pemulihan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, dan respon terhadap persoalan aktual masyarakat saat ini. Di samping itu, perubahan realokasi pos-pos anggaran harus berangkat dari evaluasi atas capaian anggaran pada tahun atau semester sebelumnya.

Performance pendapatan dan belanja daerah yang proporsional dan progresif diharapkan dapat menggerakan kegiatan perekonomian Jawa Timur sampai akhir tahun 2025 di tengah kondisi ekonomi global dan nasional yang kurang baik-baik saja. Langkah ini diperlukan agar warga masyarakat dapat merasakan dampak dari realisasi belanja daerah.

Karena itu, pembahasan P-APBD 2025 ini, harus difokuskan pada; selain berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi target-target RPJMD dan target yang telah digariskan dalam RKPD 2025- juga harus mampu menjawab persoalan dan perkembangan/perubahan keadaan terkini. Semoga ada recovery (pemulihan) kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang lebih baik dan bisa tumbuh kembang secara berkelanjutan.

HET PUPUK TURUN, KHUSNUL DPRD JATIM INGATKAN PENGAWASAN KIOS NAKAL

Pemerintah pusat resmi menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi hingga 20 persen. Kebijakan ini disambut positif oleh kalangan legislatif Jawa Timur karena dinilai mampu meringankan beban petani menjelang musim tanam akhir tahun.

Namun, di balik kabar gembira tersebut, Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Khusnul Khuluk, mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap kios pupuk nakal yang kerap menjual di atas harga resmi.

"Dengan turunnya pupuk bersubsidi, tentu petani akan senang dan bahagia karena sangat membantu dari sisi pembiayaan," ujar Khusnul, yang juga anggota Fraksi PKS DPRD Jatim, Senin (27/10/2025).

"Tapi pemerintah harus tetap memastikan harga di lapangan tidak melebihi HET, karena biasanya ada oknum-oknum kios yang nakal menjual di atas harga yang ditetapkan," tegasnya.

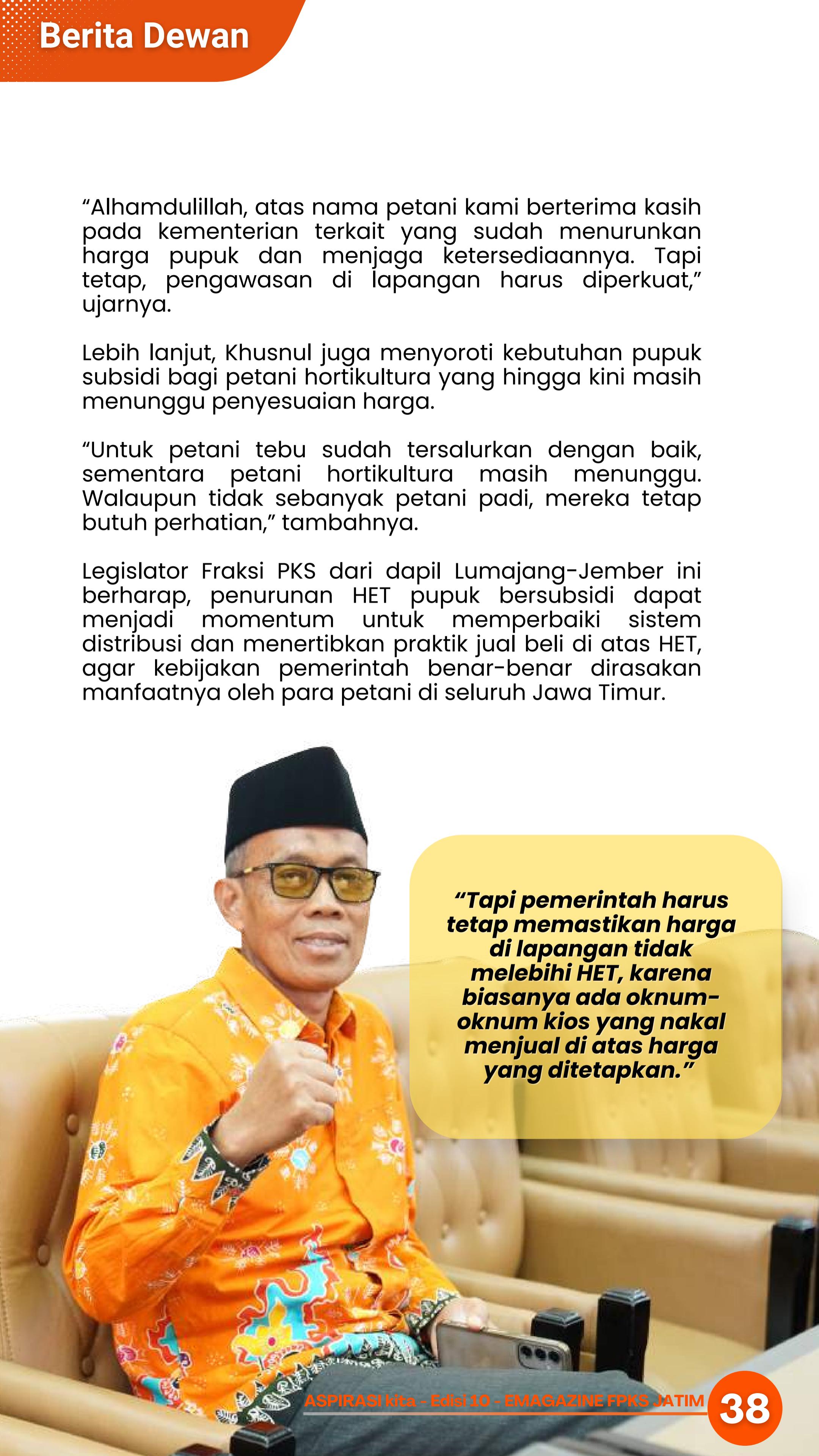
Khusnul menilai kebijakan penurunan harga ini akan efektif jika disertai pengawasan distribusi dan stok pupuk yang merata di tingkat petani. Ia meminta dinas terkait di daerah turut aktif memantau distribusi agar tidak terjadi kelangkaan maupun permainan harga.

"Alhamdulillah, atas nama petani kami berterima kasih pada kementerian terkait yang sudah menurunkan harga pupuk dan menjaga ketersediaannya. Tapi tetap, pengawasan di lapangan harus diperkuat," ujarnya.

Lebih lanjut, Khusnul juga menyoroti kebutuhan pupuk subsidi bagi petani hortikultura yang hingga kini masih menunggu penyesuaian harga.

"Untuk petani tebu sudah tersalurkan dengan baik, sementara petani hortikultura masih menunggu. Walaupun tidak sebanyak petani padi, mereka tetap butuh perhatian," tambahnya.

Legislator Fraksi PKS dari dapil Lumajang-Jember ini berharap, penurunan HET pupuk bersubsidi dapat menjadi momentum untuk memperbaiki sistem distribusi dan menertibkan praktik jual beli di atas HET, agar kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para petani di seluruh Jawa Timur.



"Tapi pemerintah harus tetap memastikan harga di lapangan tidak melebihi HET, karena biasanya ada oknum-oknum kios yang nakal menjual di atas harga yang ditetapkan."

FRAKSI PKS

JAWA TIMUR



www.fraksipksjatim.id



fraksipksjatim